PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA
MANADO

LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas rahmat dan Kuasa-Nya sehingga Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dapat disusun dan selesai dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Jajaran Hakim dan pegawai PTUN Manado, karena telah bekerja sama dengan baik sehingga laporan kegiatan ini dapat diselesaikan.

Dengan ini disampaikan laporan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program sebagaimana tercantum pada DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung R.I
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I
3. Program Peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung R.I terdiri atas pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I meliputi pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa Laptop untuk Hakim.

Kegiatan Program Peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara meliputi Pelayanan Posbakum dan Pelayanan Perkara Prodeo.

Laporan Tahunan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dari Instansi PTUN Manado yang juga merupakan nilai kelembagaan dari Mahkamah Agung. Laporan Tahunan ini dibuat untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas dan fungsi yang di emban oleh PTUN Manado serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Tingkat Banding. Selain itu laporan ini bertujuan untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan Pengadilan Tingkat Banding sebagai sumber data penyusunan laporan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinan dan pengawasan oleh Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

KETUA

TEDI ROMYADI, S.H., M.H.
NIP. 19620204 198012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI

A. KEADAAN PERKARA DI PTUN MANADO 2

B. PENYELESAIAN PERKARA 3

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) 4

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL 5
2. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS 7
3. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA 9
4. MUTASI 10
5. PROMOSI 11
6. PENSIUN 13
7. DIKLAT 14

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SUASANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN 18

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 19

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PTUN MANADO 24
2. IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PTUN MANADO 24

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 26

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 26

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 26

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL 28

B. EVALUASI 29

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN 30

B. REKOMENDASI 31

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkedudukan di Jl. Pumorouw No. 66 kode pos 95125 Kota Manado. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1992 (pasal 2 ayat 3) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993. Pada awalnya berdirinya daerah Hukum PTUN Manado meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1997 didirikan PTUN Palu yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Daerah Hukum PTUN Manado tinggal Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Sulawesi Utara. Tahun 2000 Provinsi Sulawesi Utara dimekarkan dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo maka saat ini Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kota didalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tinggal meyisahkan satu Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota, 3 Kabupaten yaitu sangihe, Talaud dan Sitaro adalah Daerah Kepulauan.

Laporan ini dibuat berdasarkan perkembangan yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam satu tahun. Selain diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, laporan pelaksanaan kegiatan ini juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja internal Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Dengan adanya laporan ini diharapkan akan membantu mengontrol dan mendokumentasikan perkembangan statistik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara ringkas sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dapat mengetahui fluktuasi hasil kerja pada setiap bulan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. Keadaan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Manado

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tahun 2019 adalah meliputi sisa perkara tahun 2018 ditambah dengan jumlah perkara yang masuk atau didaftar sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Tahun 2018 terdapat sisa perkara yang belum diputus dan harus diselesaikan atau diputus pada tahun 2019 disebabkan karena perkara-perkara tersebut masih dalam proses persidangan, untuk sisa perkara tahun 2018 yang harus diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 11 perkara sedangkan yang masuk atau didaftarkan pada tahun 2019 sebanyak 38 perkara gugatan dan 2 perkara permohonan (Permohonan Fiktif Positif) sehingga total perkara yang harus diselesaikan berjumlah 11 + 38 + 2 = 51 perkara.

No.	Jenis Perkara	Perkara Sisa Tahun 2018	Perkara Masuk Tahun 2019	Jumlah Perkara
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Gugatan	11	38	49
2	Permohonan	-	2	2
TOTAL				51

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Untuk perkara yang dimohonkan Banding pada tahun 2018 dan belum diputus sampai dengan tahun 2019 merupakan sisa perkara Banding tahun 2018 sebanyak 11 perkara, sedangkan perkara yang dimohonkan Banding pada tahun 2019 sebanyak 15 perkara sehingga total perkara yang harus diselesaikan berjumlah 26 perkara.

No	Perkara Sisa Tahun 2018	Perkara Masuk Tahun 2018	Jumlah Perkara
1	*2*	*3*	*4*
1	11	15	26

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara yang dimohonkan Kasasi tahun 2018 dan belum diputus sampai tahun 2019 merupakan sisa perkara Kasasi tahun 2018 berjumlah 8 sedangkan perkara yang dimohonkan Kasasi tahun 2019 berjumlah 12 perkara sehingga total perkara Kasasi yang harus diselsaikan berjumlah 20 perkara.

No	Perkara Sisa Tahun 2018	Perkara Masuk Tahun 2018	Jumlah Perkara
1	*2*	*3*	*4*
1	8	12	20

4. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Keadaan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2018 dan belum diputus pada tahun 2018 berjumlah 8 perkara sedangkan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tahun 2019 berjumlah 4 perkara sehingga total perkara Peninjauan Kembali yang harus diselesaikan berjumlah 12 perkara.

No	Perkara Sisa Tahun 2018	Perkara Masuk Tahun 2018	Jumlah Perkara
1	*2*	*3*	*4*
1	8	4	12

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Pada tahun 2019 semua perkara sisa tahun 2018 telah diputus serta diminutasi sehingga 11 perkara sisa atau tunggakan tahun 2018 telah diselesaikan pada tahun 2019.

Sedangkan dari 38 perkara gugatan dan 2 perkara permohonan atau 40 perkara yang didaftarkan pada tahun 2019 yang telah diputus dan diminutasi pada tahun 2019 sebanyak 20 perkara.

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Untuk perkara sisa tahun 2018 sebanyak 11 perkara yang telah diputus tahun 2019 ditambah 20 perkara yang didaftarkan dan diputus tahun 2019 atau total 31 perkara, dari 31 perkara terdapat 29 perkara yang diputus tepat waktu sedangkan 2 perkara yang

diputus melampaui 5 bulan disebabkan pada saat persidangan para pihak sering tidak hadir dan walaupun telah berkali-kali diingatkan oleh Majelis Hakim akan tetapi para pihak selalu memenuhi tuntutan dari Majelis Hakim pada saat kesempatan yang terakhir sehingga pada tahun 2019 terdapat 2 perkara yang diputus melampaui 5 bulan.

3. **Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Bading, Kasasi dan PK**

Perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 31 perkara dan dari 31 perkara yang diputus, dicabut maupun dismissal tahun 2019 terdapat sebanyak 15 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding sedangkan 16 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Dari 15 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding sampai dengan akhir tahun 2019 masih terdapat 6 perkara yang belum putus Banding sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 2 perkara.

Pada tahun 2019 dari 15 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding terdapat sebanyak 12 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 3 perkara.

Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2019 sampai dengan laporan ini dibuat tidak ada yang mengajukan upaya PK.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

1. **POSBAKUM**

Pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melakukan MoU bersama Pos Bantuan Hukum Ikadin Sulawesi Utara dengan nomor W4.TUN2/09a/PL.08/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Surat Perintah Kerja Posbakum 2019. Pada tahun 2019 mereka telah melaksanakan piket secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan telah mendampingi satu pemohon yang kurang mampu.

2. **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Pada tahun 2019 terdapat 1 perkara Prodeo dan perkara tersebut telah diputus tepat waktu di mana Penggugat tidak lagi mengajukan upaya hukum Banding.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) adalah suatu faktor yang sangat penting bahkan tidak terlepas dari suatu organisasi yang pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan di organisasi apakah itu pemerintah atau swasta. SDM adalah penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, melalui pengelolaan SDM pada jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang unggul diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Teknis Yudisial dan SDM Non Teknis supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun kondisi SDM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang teknis yudisial pada akhir tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 1 orang Ketua/Hakim, 6 (enam) orang Hakim, 1 orang Panitera, 1 orang Panitera Muda Hukum, 1 orang Panitera Muda Perkara, 4 (empat) orang Panitera Pengganti, 2 (orang) Juru Sita Pengganti, dan 1 orang PNS/Calon Hakim.

Berikut daftar ASN di bidang teknis yudisial ditinjau dari jabatan, pangkat/golongan ruang, tingkat pendidikan, umur, dan jenis kelamin.

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN	UMUR	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7
1	TEDI ROMYADI, S.H., M.H. NIP. 19620204.198012.1.001	Ketua/ Hakim	Pembina Utama Madya (IV/d)	Strata 2 (S-2)	57 tahun	L
2	AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 19750522.200012.1.002	Hakim	Pembina (IV/a)	Strata 2 (S-2)	44 tahun	L
3	ZARINA, S.H. NIP. 19720513.200604.2.001	Hakim	Penata Tingkat I (III/d)	Strata 1 (S-1)	47 tahun	P
4	ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H. NIP. 19820629.200704.1.001	Hakim	Penata Tingkat I (III/d)	Strata 2 (S-2)	37 tahun	L
5	ANANG SUSENO HADI, S.H., M.H. NIP. 19841208.200704.1.001	Hakim	Penata Tingkat I (III/d)	Strata 2 (S-2)	35 tahun	L
6	SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H. NIP. 19820819.200704.1.001	Hakim	Penata Tingkat I (III/d)	Strata 1 (S-1)	37 tahun	L
7	MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H., M.H.	Hakim	Penata (III/c)	Strata 2 (S-2)	37 tahun	L

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN	UMUR	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7
	NIP. 19820402.200805.1.001					
8	VENTJE RECHARD EDISON SUMUAL, S.H., M.H. NIP. 19600608.199103.1.001	Panitera	Pembina Tingkat I (IV/b)	Strata 2 (S-2)	59 tahun	L
9	OKTOFIEN WELHELMINA MAKALEW, S.H. NIP. 19681006.199103.2.001	Panitera Muda Perkara	Penata Tingkat I (III/d)	Strata 1 (S-1)	51 tahun	P
10	JOEL JOJADA ALEXANDER ROEROE, S.H. NIP. 19700110.199103.1.005	Panitera Muda Hukum	Penata Tingkat I (III/d)	Strata 1 (S-1)	49 tahun	L
11	ALFRED ZACHARIAS PAAT, S.H. NIP. 19630426.199803.1.001	Panitera Pengganti	Penata Tingkat I (III/d)	Strata 1 (S-1)	56 tahun	L
12	JOPPI TUMBUAN, S.H. NIP. 19690901.199003.1.003	Panitera Pengganti	Penata Tingkat I (III/d)	Strata 1 (S-1)	50 tahun	L
13	JACOB JOHANES J. MAKALEW NIP. 19600704.198402.1.001	Panitera Pengganti	Penata (III/c)	SMA	59 tahun	L
14	JOLLA TUMBUAN, S.H. NIP. 19680703.199303.2.001	Panitera Pengganti	Penata (III/c)	Strata 1 (S-1)	51 tahun	P
15	SAMSON BRONSON WONGKAR, S.E. NIP. 19760103.200112.1.001	Juru Sita Pengganti	Penata Muda (III/a)	Strata 1 (S-1)	43 tahun	L
16	ISWANTO KAU NIP. 19770803.200604.1.002	Juru Sita Pengganti	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	42 tahun	L
17	MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H. NIP. 19930111.201712.1.003	PNS/Calon Hakim	Penata Muda (III/a)	Strata 1 (S-1)	26 tahun	L

Pendidikan :

- SMA : 2 Orang
- S1 : 9 Orang
- S2 : 6 Orang

Jenis Kelamin :

- Laki-Laki : 14 Orang
- Perempuan : 3 Orang

Pangkat/Gol :

- II/d : 1 Orang
- III/a : 2 Orang
- III/c : 3 Orang
- III/d : 8 Orang

- IV/a : 1 Orang
- IV/b : 1 Orang
- IV/d : 1 Orang

2. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS

Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer di bidang non teknis pada akhir tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 10 (sepuluh) orang Tenaga Honorer.

Berikut daftar ASN di bidang non teknis ditinjau dari jabatan, pangkat/golongan ruang, tingkat pendidikan, umur, dan jenis kelamin.

ASN NON TEKNIS

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN	UMUR	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7
1	MARFEL ROMPAS, S.E. NIP. 19710313.199303.1.004	Sekretaris	Penata Tingkat I (III/d)	Strata 1 (S-1)	48 tahun	L
2	MARIA SUZANA RAMPENGAN, S.E. NIP. 19761021.200502.2.001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penata Tingkat I (III/d)	Strata 1 (S-1)	43 tahun	P
3	YANTI YUNITA WONOK NIP. 19740130.199303.2.002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penata (III/c)	SMA	45 tahun	P
4	HERTA BUTARBUTAR NIP. 19720718.199403.2.001	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	SMA	47 tahun	P
5	REINHARD WYNNER LETARE SIMATUPANG, S.I.A. NIP. 19910610.201903.1.008	CPNS/Analis Kepegawaian Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	Strata 1 (S-1)	28 tahun	L
6	DIDIT WAHYU HARYADI, S.H. NIP. 19841226.201903.1.004	CPNS/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Penata Muda (III/a)	Strata 1 (S-1)	35 tahun	L

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN	UMUR	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7
7	SYARIFAH BAHARUDDIN, S.H. NIP. 19940115.201903.2.010	CPNS/Analis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)	Strata 1 (S-1)	25 tahun	P

Berikut daftar Tenaga Honorer ditinjau dari penunjukan tugas, tingkat pendidikan, umur, dan jenis kelamin.

TENAGA HONORER

NO.	NAMA	DITUNJUK SEBAGAI	TINGKAT PENDIDIKAN	UMUR	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6
1	JOAN MENTANG	Satpam/Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	SMA	34 tahun	L
2	KIKI MARIO PONTOLULI	Satpam/ Kepaniteraan Perkara	SMA	42 tahun	L
3	FREDRIK L. KAMAGI	Pengemudi/ Asisten Pribadi Ketua	SMA	35 tahun	L
4	ROLLY R. H. DUMAIS	Pengemudi/ Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMA	39 tahun	L
5	CHRISTIE V. P. TUUK, AME	Pengemudi/ Sub Bagian Umum dan Keuangan	Diploma 3 (D-3)	37 tahun	L
6	FERNANDO LANGI	Pengemudi/ Kepaniteraan Perkara	SMA	23 tahun	L
7	FEIBER ROMPAS	Pramubakti/ Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMA	33 tahun	L
8	MARIA IGNATIA UNGGA	Pramubakti/ Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	SMA	24 tahun	P
9	JOSIA G. M. ROEROE	Pramubakti/ Kepaniteraan Hukum	SMA	20 tahun	L
10	BRIAN J. MONDORINGIN	Pramubakti/ Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMA	25 tahun	L

3. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Melihat paparan profil SDM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang total ASN-nya sejumlah 24 (dua puluh empat) orang dan Tenaga Kontrak sejumlah 10 (sepuluh) orang maka menurut analisa kami masih kekurangan SDM untuk bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Kondisi pada bagian Kesekretariatan adalah 2 (dua) orang Juru Sita Pengganti diperbantukan sebagai staf pelaksana bagian Kesekretariatan sehingga beban tugas Juru Sita Pengganti ini sangat berat karena selain melaksanakan tugas pokok sesuai jabatannya, masih diberikan tugas tambahan pada bagian Kesekretariatan.

Oleh karena itu, sesuai hasil penyusunan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dinyatakan dalam Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor W4.TUN2/945/KP.00.1/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penetapan Hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan Perhitungan Analisis Beban Kerja, maka kekurangan ASN pada bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KEKURANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	PENGADMINISTRASI HUKUM (PERKARA)	0	1	1
2	PENGELOLA PERKARA	0	4	4
3	PENGADMINISTRASI HUKUM (HUKUM)	0	2	2
4	PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM	0	2	2
5	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	2	1
6	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	0	1	1
7	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	1	1
8	PENGELOLA SISTEM JARINGAN	0	1	1
9	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	0	1	1
10	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	0	1	1
11	BENDAHARA	1	2	1
12	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	0	1	1
13	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)	0	1	1

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KEKURANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
14	PRANATA BARANG DAN JASA	0	1	1
15	AJUDAN	0	2	2
16	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	0	1	1
JUMLAH KEKURANGAN ASN (dalam orang)				**23**

Oleh karena itu, kami memohon pertimbangan dari Pimpinan Tingkat Banding, Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat merealisasikan kebutuhan jumlah ASN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sehingga tidak terdapat lagi rangkap tugas dan pelaksanaan tugas pokok serta pelayanan masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan dengan tuntas dan maksimal.

3. MUTASI

Berikut kami sajikan pola mutasi baik mutasi internal, mutasi masuk, dan mutasi keluar yang terjadi selama tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

a. Mutasi Internal

1) **Oktofien Welhelmina Makalew, S.H.** sebagai Panitera Muda Perkara sekaligus membantu tugas pada Bagian Kepaniteraan Perkara (Meja II).
2) **Joppi Tumbuan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti sekaligus membantu tugas pada Bagian Kepaniteraan Perkara (Meja III).
3) **Jolla Tumbuan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti sekaligus membantu tugas pada Bagian Kepaniteraan Perkara (Meja I).
4) **Samson Bronson Wongkar, S.E.** sebagai Juru Sita Pengganti sekaligus membantu tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagai Bendahara Pengeluaran.
5) **Iswanto Kau** sebagai Juru Sita Pengganti sekaligus membantu tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan.

b. Mutasi Keluar

1) **Christin Andriani, S.H., M.H.,** Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mutasi sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2) **Sanny Pattipeilohy, S.H, M.H.,** Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mutasi sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

3) **Baharuddin, S.H., M.H.,** Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mutasi sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

4) **Jaenal Arifin Sujoko, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

c. Mutasi Masuk

1) **Al'an Basyier, S.H., M.H.,** Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mutasi sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

2) **Herta Butarbutar,** Staf Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mutasi sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	SATKER AWAL	SATKER BARU	SK MUTASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 19750522.200012.1.002	Pembina (IV/a)	Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/SK/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
2	HERTA BUTARBUTAR NIP. 19720718.199403.2.001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 185/SEK/Kp.I/SK/III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Promosi Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI

4. PROMOSI

Pola promosi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tahun 2019 adalah promosi kenaikan pangkat, promosi kenaikan gaji berkala, dan promosi jabatan. Berikut disajikan promosi yang terjadi.

a. Promosi Kenaikan Pangkat Reguler per April 2019

Golongan III/c ke III/d : 2 orang

b. Promosi Kenaikan Pangkat Reguler per Oktober 2019

-

c. **Promosi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2019**

- Periode Februari 2019 : 1 orang
- Periode Maret 2019 : 4 orang
- Periode April 2019 : 4 orang
- Periode Desember 2019 : 1 orang

d. **Promosi Jabatan Tahun 2019** : 2 orang

PROMOSI KENAIKAN PANGKAT REGULER PER APRIL 2019

TMT: 01 APRIL 2019

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG LAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG BARU	SK KENAIKAN PANGKAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H. NIP. 19820819.200704.1.001	Hakim	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)	Keputusan Dirjen Badimiltun Mahkamah Agung RI 83/Djmt/SK/KP/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Hakim
2	ANANG SUSENO HADI, S.H., M.H. NIP. 19841208.200704.1.001	Hakim	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)	Keputusan Dirjen Badimiltun Mahkamah Agung RI 356/Djmt/SK/KP/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Hakim

PROMOSI JABATAN TAHUN 2019

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SK PROMOSI JABATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	MARFEL ROMPAS, S.E. NIP. 19710313.199303.1.004	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 185/SEK/Kp.I/SK/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Promosi Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI
2	HERTA BUTARBUTAR NIP. 19720718.199403.2.001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 185/SEK/Kp.I/SK/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Promosi Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI

5. PENSIUN

Selama periode tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terdapat 1 Pegawai Negeri Sipil yang pensiun/purna bakti yakni:

- **Martha Sumale** per 1 April 2019

NO.	NAMA/NIP	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG TERAKHIR	SK PENSIUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	MARTHA SUMALE NIP.19610330.198403.2.001	Sekretaris	Pembina Utama Muda (IV/c)	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00278/13001/AZ/12/18 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun

6. DIKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS

Sasaran peningkatan efektifitas kualitas SDM melalui Diklat dan Bimbingan Teknis dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen SDM dalam memberikan pelayanan dalam menyelenggarakan peradilan. Berikut disajikan informasi ASN Teknis Yudisial, ASN Non Teknis, dan Tenaga Honorer Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang telah mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis dalam periode tahun 2019.

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	DASAR KEGIATAN	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**JAENAL A. SUJOKO, S.H.** NIP. 19790516.200604.1.004	Panitera Pengganti	BIMTEK	Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan TA 2018 Tingkat UAPPS-W Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara	28 Januari 2019	Surat Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sulawesi Utara Nomor S-113/WPB.30/BD.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Undangan Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan TA 2018 Tingkat UAPPS-W Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara	-
2	**ANANG SUSENO HADI, S.H., M.H.** NIP. 19841208.200704.1.001	Hakim	BIMTEK	Bimtek Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2019	3 – 5 April 2019	Surat Dirjen Badimiltun Mahkamah Agung RI Nomor 331/Djmt/B/03/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Pemanggilan Peserta Bimtek Hakim Pengadilan TUN 2019	-
3	**CHRISTIE V. P. TUUK, AME**	Tenaga Kontrak (Pengemudi / Sub Bagian Umum dan Keuangan)	BIMTEK	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan K/L Tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2019	3 Juli 2019	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-551/WPB.30/BD.05/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal Undangan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan K/L Tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2019 serta Overview Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan terhadap LKKL	-
4	**JOAN MENTANG**	Tenaga Kontrak (Satpam/Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan)					
5	**ZARINA, S.H.** NIP. 19720513.200604.2.001	Hakim	DIKLAT	Diklat Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa ASN Pasca	8 – 12 Juli 2019	Surat Dirjen Badimiltun Mahkamah Agung RI Nomor 770/Djmt.3/B/7/2019 tanggal 1	Lulus Diklat

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	DASAR KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018		Juli 2019 perihal Pemanggilan Peserta Diklat Sengketa Sengketa TUN dan Sengketa ASN Pasca Berlakunya Perma 6 Tahun 2018	
6	**JOEL JOJADA ALEXANDER ROEROE, S.H.** NIP. 19700110.199103.1.005	Panitera Muda Hukum	BIMTEK	Bimtek Pemberkasan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil, dan Sengketa Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	24 – 26 Juli 2019	Surat Dirjen Badimiltun Mahkamah Agung RI Nomor 734/Djmt/Ratgas/7/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Surat Tugas	-
7	**TEDI ROMYADI, S.H., M.H.** NIP. 19620204.198012.1.001	Ketua/ Hakim	BIMTEK	Bimtek Penggiat Anti Narkonba Instansi Pemerintah dan Swasta	22 Agustus 2019	Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor B/667/VIII/Ka/Cm.01.02/2019/BNNP-SULUT tanggal 19 Agustus 2019 perihal Undangan Peserta	-
8	**REINHARD WYNNER LETARE SIMATUPANG, S.I.A.** NIP. 19910610.201903.1.008	CPNS/Analis Kepegawaian Ahli Pertama	PELATIHAN DASAR CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Gol. III	23 September – 30 November 2019	Surat Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 515/Bld/S/9/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. III di PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar Tahun 2019	Lulus Pelatihan Dasar
9	**DIDIT WAHYU HARYADI, S.H.** NIP. 19841226.201903.1.004	CPNS/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur					
10	**SYARIFAH BAHARUDDIN, S.H.** NIP. 19940115.201903.2.010	CPNS/Analis Perkara Peradilan					

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	DASAR KEGIATAN	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11	**ANANG SUSENO HADI, S.H., M.H.** NIP. 19841208.200704.1.001	Hakim	PELATIHAN TEKNIS	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	11 – 16 November 2019	Surat Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 1452/Bld.3/Dik/S/11/2019 tanggal 7 November 2019 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Lulus Pelatihan Teknis
12	**MARFEL ROMPAS, S.E.** NIP. 19710313.199303.1.004	Sekretaris	BIMTEK	Bimtek Teknis Kepegawaian	29 November 2019	Surat Pengadilan Tinggi Manado Nomor W19-U/2385/KP.02.2/XI/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Undangan Bimbingan Teknis Kepegawaian	
13	**YANTI YUNITA WONOK** NIP. 19740130.199303.2.002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana					

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA 01) Mahkamah Agung RI dengan Nomor SP DIPA- 005.01.2.531872/2019. Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kode satker DIPA A-005.01.2.531872 mendapat alokasi Anggaran Belanja **Rp. 5.736.020.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)** namun terdapat beberapa kali Revisi Anggaran dan mendapat Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sehingga total anggaran diakhir tahun 2019 setelah dilakukan Revisi ke 10 berubah menjadi **Rp. 4.919.233.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas JutaDua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)**

- **Realisasi Anggaran Non Teknis**

Anggaran Belanja Kode Satker DIPA-05.01.2.531872 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado meliputi Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Belanja Non-Operasional, Dan Belanja Modal dengan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Per 31 Desember 2019, dengan rincian masing-masing belanja adalah sebagai berikut :

1. DIPA 005.01.01.2.531872

No	Uraian Belanja	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Pegawai	3.847.483.000	3.837.644.408	9.838.592	99.74
2	Belanja Barang	1.053.838.000	1.045.506.654	8.331.346	99.21
3	Belanja Modal	65.000.000	64.391.250	608.750	99.06

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan militer dan tata Usaha Negara (TUN) per 31 Desember 2019.

DIPA 005.05.2.531873

No	Uraian Belanja	Pagu DIPA	Revisi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Barang	51.450.000	51.435.000	15.000	99.97

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana Prasarana Sangat berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Publik masyarakat pencari keadilan. Tahun demi tahun Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berusaha meningkatkan ketersediaan Sarana Prasarana walaupun disadari masih belum mencapai maksimal. Akan tetapi ada perubahan kearah kebaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 SOP Pengelolaan Sarana Prasarana menggunakan sasaran mutu berdasarkan Hasil Akreditasi dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 agar penangganan lebihdapat terukur dan akan lebih meningkatkan. Sehingga dapat mencapai sasaran yangdiinginkan. Berikut keadaan Sarana Prasarana Tahun 2019:

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terletak Komplek Perkantoran Jalan Raya Pumorouw No.66 Kelurahan Banjer Kec.Tikala Nomor Telpon 0431-853765, Luas Tanah Kantor 3500 M2 dengan Status Tanah Hak Guna Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Pengadaan Tanah dilaksanakan Tahun 1992 Luas Bangunan 1000 M2 Luas Halaman 2500 M2 satu Lantai Belum Protype.

2. Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Gedung

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung yang disediakan dalam DIPA 01 Tahun 2019 meliputi Pemeliharaan Gedung, Kendaraan, Dinas, Inventaris, Laptop, AC dan Mesin Foto Copy sebagai berikut :

REALISASI DATA PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Jumlah S/D Bulan Ini	%	Sisa Dana	%
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134.370.000	134.306.521	99.95	63.479	00.05
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.229.000	130.132.450	99.93	96.550	00.07

Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	**Rumah Dinas**					
1	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓			
3	Rumah Dinas Hakim	1	✓			
4	Rumah Dinas Hakim	4		✓		Tipe B Gol. II
5	Rumah Dinas Hakim	1		✓		Tipe C Gol. II

Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1	Sedan (Toyota Vios)	2007	✓			
2	Station Wagon (Nissan Livina)	2011	✓			
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1	Sepeda Motor (Suzuki FL 125 RCD)	2007	✓			

2	Sepeda Motor (Suzuki FL 125 RCD)	2008	✓			
3	Sepeda Motor (Honda Revo 115)	2009	✓			
4	Sepeda Motor (Honda Revo 115	2009	✓			
5	Sepeda Motor (Honda Revo 115)	2009	✓			
6	Seped Motor (Yamaha Jupiter MX)	2011	✓			
7	Sepeda Motor (Yamah Xeon 125)	2011	✓			
8	Sepeda Motor (Yamaha Soul GT 125)	2015	✓			

Matriks Sarana / Prasarana di Wilayah Hukum

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Arsip Panitera Muda Hukum	1	
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Sidang Umum	2	
8	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang Panitera Muda Perkara	1	
10	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
11	Ruang Kasubag Umum & Keuangan	1	
12	Ruang Kasubag Kepeg. & Ortala	1	
13	Ruang Kasubag Perencanaan, IT & Pelaporan	1	
14	Ruang Perpustakaan	1	
15	Ruang Musholla	1	
16	Ruang POSBAKUMDIN	1	
17	Ruang Sound System	1	
18	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
19	Ruang Arsip Perkara dan Hukum	1	
20	Gudang	1	

21	Toilet Umum	4	
22	Mesin Foto Copy Folio	2	
23	Lemari Besi / Metal	14	
24	Lemari Kayu	23	
25	Rak Kayu	1	
26	Filling Cabinet Besi	29	
27	Brankas	2	
28	Peti Uang / Cash Box / Coin Box	2	
29	Tabung Pemadam Api	5	
30	CCTV – Camera Control Television System	10	
31	Papan Visual / Papan Nama	4	
32	White Board	3	
33	Mesin Absensi	2	
34	Alat Pengaman / Sinyal	1	
35	Display	1	
36	LCD Projector / Infocus	1	
37	Perkakas Kantor Lainnya	8	
38	Alat Kantor Lainnya	2	
39	Meja Kerja Kayu	62	
40	Kursi Besi / Metal	172	
41	Kursi Kayu	20	
42	Sice	9	
43	Bangku Panjang Besi / Metal	6	
44	Bangku Panjang Kayu	8	
45	Meja Komputer	7	
46	Meja Telepon	2	
47	Meja Resepsionis	1	
48	Kasur / Spring Bed	4	
49	Meja Makan Besi	3	
50	Meja Makan Kayu	1	
51	Pot Bunga	2	
52	Partisi	1	

53	Meubelair Lainnya	1	
54	Jam Elektronik	7	
55	Mesin Potong Rumput	1	
56	Mesin Cuci	1	
57	AC Split	22	
58	Kipas Angin	9	
59	Sound System	9	
60	Wireless	1	
61	Microphone	1	
62	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use)	1	
63	Lambang Garuda Pancasila	2	
64	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	
65	Tiang Bendera	3	
66	Tangga Alumunium	1	
67	Kaca Hias	3	
68	Dispenser	2	
69	Mimbar Podium	1	
70	Palu Sidang	3	
71	Lambang Instansi	2	
72	Karpet	2	
73	Audio Mixing Console	1	
74	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	
75	Telephone (PABX)	1	
76	Facsimile	1	
77	Genset	1	
78	Kamera Digital	1	
79	Internet	1	
80	P.C. Unit	38	
81	Laptop	21	
82	Monitor	3	
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	
84	Scaner (Peralatan Personal Komputer)	1	

85	Server	2	
86	Router	1	
87	Hub	4	
88	Modem	1	
89	Head Copy Terminal	1	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-court di Lingkungan PTUN Manado

Selama tahun 2019 PTUN Manado melalui Admin E-Court telah melaksanakan sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2019 baik kepada seluruh Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti maupun kepada Advokat serta masyarakat pencari keadilan, sosialisasi kepada personil PTUN Manado dilaksanakan melalui rapat ataupun secara perseorangan sedangkan kepada Advokat maupun masyarakat pencari keadilan dilaksanakan melalui sudut e-court yang terdapat di meja PTSP PTUN Manado.

Hasil dari sosialisasi tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2019 perkara yang didaftarkan melalui e-court sebanyak 14 perkara.

Untuk persidangan secara elektronik memang PTUN Manado belum melaksanakannya disebabkan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 630/SEK/SK/VII/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di mana untuk PTUN Manado belum termasuk dalam surat edaran ini sehingga walaupun telah ada PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektornik akan tetapi PTUN Manado belum melaksanakan Persidangan Secara Elektronik disebabkan belum ada pencabutan atau petunjuk pengganti terhadap Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/SEK/SK/VII/2019.

2. Implementasi SIPP di Lingkungan PTUN Manado

Pelaksanaan SIPP di PTUN Manado selama tahun 2019 dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 11 perkara sisa tahun 2018 ditambah 38 perkara gugatan dan 2 perkara permohonan yang didaftarkan tahun 2019 sehingga dari total 51 perkara, yang diputus pada tahun 2019 berjumlah 31 perkara dimana sisa perkara tahun 2019 sebanyak 20 perkara, dari sisa perkara yang berjumlah 20 perkara ini disebabkan karena perndaftaran perkara terbanyak berada pada bulan Oktober 2019, bulan Nopember 2019 dan bulan

Desember 2019 sehingga perkara-perkara tersebut sampai dengan akhir tahun 2019 masih dalam tahap pemeriksaan persiapan maupun persidangan yang mana ke 20 perkara tersebut menjadi tunggakan perkara tahun 2019 untuk diselesaikan pada tahun 2020.

Walaupun demikian penyelesaian perkara di PTUN Manado tahun 2019 sudah dapat dikategorikan baik hal ini dapat kita lihat pada SIPP Mahkamah Agung maupun MIS (Monitoring Implementasi SIPP) sampai dengan pertanggal 31 Desember 2019 prosentase penyelesaiaan perkara PTUN Manado adalah 61.54% disebabkan sampai dengan akhir tahun 2019 masih terdapat 20 perkara yang belum diputus disebabkan ke 20 perkara tersebut didaftarkan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2019 sehingga masih dalam tahapan persidangan.

Pada penilaian Implementasi SIPP sampai dengan akhir tahun 2019 PTUN Manado berada pada urutan ke 20 dengan total nilai 86,03 point.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada Tahun 2018 PTUN Manado telah mendapatkan hasil akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai 91,97.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada tanggal 29 Agustus 2019 telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua PTUN Manado Nomor W4.TUN2/796/KP.04.6/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Tugas dan tanggung jawab dari Petugas Meja PTSP tertera sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan tersebut.

Letak dari Meja PTSP pada PTUN Manado berada di depan dekat pintu utama, dimana petugas yang berada di meja PTSP adalah Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Hukum, Petugas Kepaniteraan Muda Perkara dan Petugas PTSP Kesekretariatan, para petugas adalah tenaga honorer akan tetapi sebagai penanggung jawab adalah Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perkara, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana juga Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan hal ini disebabkan karena sampai dengan akhir tahun 2019 PTUN Manado masih sangat kekurangan tenaga staff.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Untuk menunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Kepaniteraan Hukum dalam hal ini Permohonan Informasi sesuai dengan amanat Surat Keputusan KMA No. 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, melalui tim kreatif PTUN Manado telah membuat inovasi berupa aplikasi E-Li (Elektronik Layanan Informasi) dalam Pelayanan Permohonan Informasi.

E-Li merupakan aplikasi pelayanan informasi sesuai dengan alur atau pedoman Surat Keputusan KMA No. 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan di mana pelayanan permohonan dari pihak pemohon informasi dapat dilaksanakan melalui E-Li dan jawaban ataupun tanggapan terhadap permohonan tersebut dapat dilakukan oleh Petugas Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi, Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat dilakukan hanya melalui aplikasi E-Li hal ini tentunya juga untuk menunjang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di PTUN Manado yang mana walaupun kekurangan tenaga Staff sehingga yang ditempat di Meja PTSP adalah tenaga honorer dengan pendidikan SMA akan tetapi pelayanan informasi dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar tujuan organisasi daftar tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan Internal meliputi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus – menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan refresif agar pelaksanaan tugas bawaan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan yang melekat ini merupakan tugas pokok yang melekat pada jabatan seorang pimpinan. Pengawasan Fungsional yaitu Pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan yang secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang melakukan audit secara independen tersebut objek yang diawasinya. Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang diberikan tanggung jawab mengawasi pada bagian Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum oleh Panitera dan bagian Kesekretariatan oleh Sekretaris sesuai tingkat jabatan yaitu:

1. Rapat Bulanan umum Tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) kali rapat yaitu : Rapat dihadiri oleh Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta dihadiri oleh seluruh Pegawai dan Honorer. Masing – masing bagian memberikan Laporan evaluasi bulanan kepada hakim pengawas bidang setiap tanggal 4 setelah itu dibahas dalam rapat semua kendala – kendala yang dihadapi, dan bukti rapat melalui notulen, daftar hadir rapat, Foto telah diarsipkan dengan baik.
2. Rapat bagian teknis pada Tahun 2019 yaitu rapat yang diikuti oleh seluruh Pejabat Fungsional Panitera, Panmud Perkara, Panmud Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita. Telah dilakukan secara berkala dan bukti rapat seperti notulen daftar hadir rapat dan foto telah diarsipkan dengan baik.
3. Rapat Bagian Non Teknis yaitu rapat yang dilaksanakan setiap bulan pada minggu pertama dan dihadiri oleh Pejabat Struktural dan Staf PTUN Manado. Bukti rapat seperti notulen daftar hadir rapat dan foto telah diarsipkan dengan baik.
4. Rapat Insidentil adalah rapat tanpa direncanakan terlebih dahulu karena adanya masalah yang memerlukan penanganan segera, hal ini tidak dapat dihitung karena situasinya Insidentil.

5. Pengawasan dan Pembinaan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
6. Pengawasan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. EVALUASI

Bahwa hasil Pengawasan melekat langsung dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan apa yang dievaluasi segera dilakukan penyelesaian pada bulan berikutnya. Pengawasan Bidang Posbakum telah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan melaksanakan rapat bersama Posbakum dilakukan perbaikan.

Berbagai program pencegahan dan pemberantasan yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk mencegah tindakan pungli dan pencaloan yang didukung sepenuhnya oleh PTUN Manado dan telah tersedia program aplikasi sebagai berikut :

1. Aplikasi SIWAS-MARI dapat di akses di https://siwas.mahkamahagung.go.id/
2. Layanan SMS Nomor 085282490900 nama, pelapor, identitas, satuan kerja, isi pengaduan.
3. Surat Elektronik (e-mail) dikirim ke pengaduan@mahkamahagung.go.id
4. Faksimili/telepon langsung melalui petugas layanan 021-29079274
5. Meja Informasi dan Pengaduan di Lobby Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
6. Kotak Pengaduan di Lobby Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
7. Surat Pengaduan dikirim kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

- Hasil Pengawasan melekat yang dilakukan terhadap seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Manado selama 2019 tidak ditemukan adanya pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin walaupun disadari masih perlu dilakukan pembinaan terhadap Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar dapat ditingkatkan kualitas pekerjaannya.
- Kekurangan SDM sehingga banyak pegawai yang merangkap tugas.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sisa perkara tahun 2018 yang harus diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 11 perkara sedangkan yang masuk atau didaftarkan pada tahun 2019 sebanyak 38 perkara gugatan dan 2 perkara permohonan (Permohonan Fiktif Positif) sehingga total perkara yang harus diselesaikan berjumlah 11 + 38 + 2 = 51 perkara.
2. Perkara yang dimohonkan Banding pada tahun 2019 sebanyak 15 perkara.
3. Perkara yang dimohonkan Kasasi tahun 2019 berjumlah 12 perkara.
4. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tahun 2019 berjumlah 4 perkara.
5. Pagu Anggaran belanja Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Kode Satker 531872 setelah revisi ke 10 sebesar **Rp. 4.919.233.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).** Dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Pegawai	3.847.483.000	3.837.644.408	9.838.592	99.74
2	Belanja Barang	1.053.838.000	1.045.506.654	8.331.346	99.21
3	Belanja Modal	65.000.000	64.391.250	608.750	99.06

6. Pagu Anggaran belanja Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Kode Satker 531873 sebesar **Rp. 51.450.000,- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).** Dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Pagu DIPA	Revisi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Barang	51.450.000	51.435.000	15.000	99.97

7. Pelaksanaan Penilaian Tim Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tim Assesmen memberikan nilai pada tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai 81,97.
8. Sesuai hasil penyusunan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dinyatakan dalam Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor W4.TUN2/945/KP.00.1/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penetapan Hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan Perhitungan

Analisis Beban Kerja, maka kekurangan ASN pada bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan sebanyak 23 Orang.

B. REKOMENDASI

1. Untuk biaya Prodeo pada tahun 2019 hanya tersedia alokasi dana DIPA bagi 1 perkara sebesar Rp. 650.000,- dan dari permintaan informasi selama tahun 2019 terdapat 2 permohonan untuk beracara dengan cuma-cuma (prodeo) akan tetapi mengingat dana yang tersedia hanya untuk 1 perkara Prodeo maka untuk permohonan yang kedua disarankan mengunakan biaya sendiri karena tidak ada lagi dana dan berdasarkan permohonan informasi yang bersagkutan setelah dilihat bahwa yang bersangkutan masih harus menempuh upaya seperti yang diamanatkan oleh PERMA 6 Tahun 2018 maka diarahkan untuk mengajukan gugatan setelah menempuh upaya sesuai dengan Perma 6 Tahun 2018 yang mana dalam perhitungan gugatan akan didaftarkan pada tahun 2020 sehingga diharapkan permohonan yang bersangkutan karena tidak mampu dapat mempergunakan biaya Prodeo tahun 2020. Demikian juga ketika 1 perkara Prodeo tahun 2019 telah diputus pada tingkat pertama dan Penggugat masih ingin melakukan upaya Banding akan tetapi karena tidak tersedianya dana Prodeo untuk upaya Banding maka yang bersangkutan hanya mendapatkan upaya hukum sampai dengan Tingkat Pertama. Diharapkan untuk biaya Prodeo PTUN Manado tahun 2020 dapat mengakomodir 2 atau lebih perkara dan dapat dipertimbangkan untuk ketersediaan dana Prodeo jika ada yang ingin mengajukan Banding, Kasasi ataupun PK. Kami telah mengusulkan anggaran untuk prodeo Tahun 2021 sebesar Rp. 1.250.000,-
2. Diharapkan pula untuk dapat memberikan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan hasil Anjab dan ABK yang telah dilakukan sebanyak 23 Orang.
3. Penambahan Tenaga Honorer Satpam dan Pramusaji sebanyak 7 Orang karenakan Pengadilan PTUN Manado telah memiliki gedung yang baru, oleh karenanya tenaga honorer, sebab tenaga honorer yang ada saat ini sebanyak 10 orang telah diperbantukan sebagai staf pada tiap bagian dan pengusulan pengangkatan honorer menjadi PPPK.
4. Pembangunan Lanjutan Rumah dinas Hakim dan Sarana Lingkungan lainnya, sebab sangat memungkinkan untuk dilakukan penambahan rumah dinas sebanyak 10 Unit protoype type 50 karena lahan kosong masih tersedia seluas 3500 M^2
5. Renovasi Rumah dinas sebanyak 4 Unit yang dibangun tahun 1993.
6. Permintaan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4.
7. Sehubungan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado akan menempati gedung yang baru, kami mengusulkan permintaan pengadaan meubeler kantor yang baru. Sebab

Tahun 2008, 2011 dan 2013 sudah empat kali PTUN Manado telah melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara, berupa peralatan dan mesin serta kendaraan operasional roda 2 dan roda 4.

8. Pengusulan Mini Bus 1 Unit untuk pegawai PTUN Manado, mengingat jarak kantor dan rumah pegawai sangat jauh. Dengan adanya mini bus diharapkan dapat mempermudah dan efisiensi waktu pegawai sehingga pegawai tidak akan terlambat masuk kantor.
9. oleh karena PTUN Manado akan menempati gedung yang baru maka gedung lama akan dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atau pinjam pakai oleh pemerintah daerah.

Manado, 07 Januari 2019

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Tedi Romyadi, S.H., M.H
NIP. 19620204.198012.1.001